panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

INDEKS SPBE TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA BATAM

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,

Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan	• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.
2. Terkelola	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
3. Terstandar-disasi	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.
4. Terintegrasi dan Terukur	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
5. Optimum	• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
2. Interaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
3. Transaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4. Kolaborasi	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
5. Optimalisasi	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88

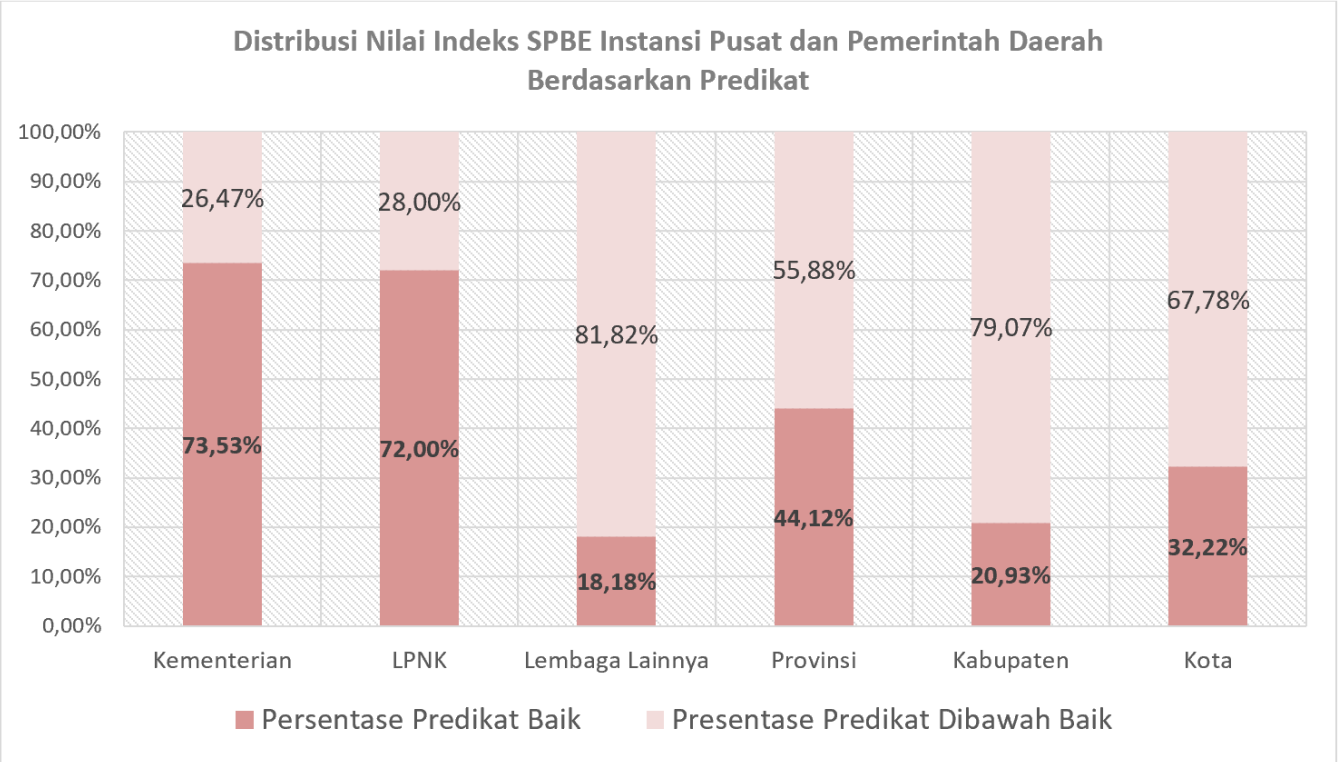

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KOTA BATAM

2,64

(Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

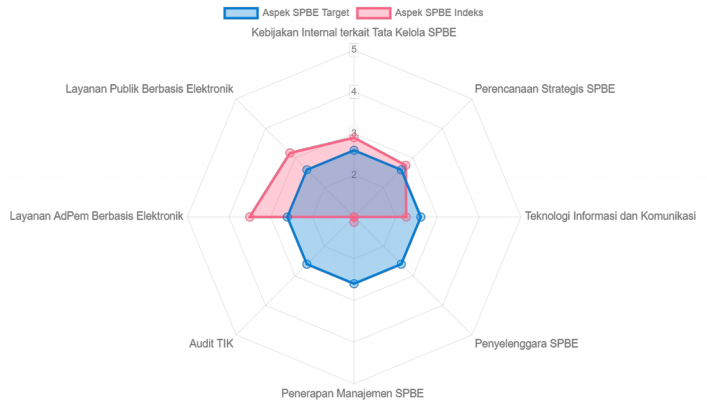

Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,64
Domain Kebijakan SPBE	2,90
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,90
Domain Tata Kelola SPBE	2,20
Perencanaan Strategis SPBE	2,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,25
Penyelenggara SPBE	1,00
Domain Manajemen SPBE	1,09
Penerapan Manajemen SPBE	1,13
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,37
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,50
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,17

Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan Pemkot Batam telah memenuhi semua aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yaitu terkait indikator Arsitektur, Peta Rencana, Manajemen Data, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- Kekuatan

  Dari seluruh indikator pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Pemkot Batam memiliki kekuatan dalam Kebijakan terkait Manajemen Data. Kebijakan tersebut telah mengatur rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.
- Kelemahan

  Pemkot Batam tidak memiliki indikator dengan tingkat kematangan 1 dan 2 untuk Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE ini.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan Pemkot Batam telah memenuhi semua Aspek Perencanaan Strategis SPBE yaitu indikator terkait Arsitektur, Peta Rencana, dan Rencana Anggaran dan Inovasi Proses Bisnis SPBE.

- Kekuatan

  Dari seluruh indikator pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Pemkot Batam memiliki kekuatan dalam kebijakan terkait Inovasi Proses Bisnis SPBE yang terdeskripsi dengan jelas dan tegas, sudah terstandar, sudah direviu dan dievaluasi meskipun belum ditindaklanjuti dengan perbaikan dan penerapan proses bisnis tersebut dalam sistem elektronik atau sistem aplikasi yang baru.
- Kelemahan

  Indikator pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE di Pemkot Batam yang memiliki tingkat kematangan 2

adalah indikator Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Arsitektur SPBE belum secara jelas mendeskripsikan domain arsitektur Keamanan SPBE sedangkan Peta Rencana SPBE belum mencakup Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK. Hal ini menjadi kelemahan dari Pemkot Batam yang perlu ditingkatkan pada evaluasi SPBE tahun berikutnya.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan Pemkot Batam telah memenuhi semua Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE yaitu indikator terkait Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- Kekuatan
  Namun belum ada indikator pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE yang menjadi kekuatan dari Pemkot Batam karena belum ada indikator yang mencapai nilai 4-5
- Kelemahan
  Indikator pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE di Pemkot Batam memiliki tingkat kematangan 2 untuk indikator Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah tersedia namun tidak/belum diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi kelemahan dari Pemkot Batam yang perlu ditingkatkan pada evaluasi SPBE tahun berikutnya.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE belum ada yang dipenuhi oleh Pemkot Batam karena belum ada indikator yang memiliki tingkat kematangan 2-5

- Kekuatan
  Dengan demikian belum ada indikator pada Aspek Penyelenggara SPBE yang menjadi kekuatan dari Pemkot Batam karena belum ada indikator yang mencapai nilai 4-5
- Kelemahan
  Indikator pada Aspek Penyelenggara SPBE di Pemkot Batam semuanya memiliki tingkat kematangan 1 yaitu untuk indikator Tim Koordinasi dan Kolaborasi Penerapan SPBE karena kegiatan koordinasi belum dilakukan secara terencana dan belum terlihat adanya kolaborasi karena tidak ada data dukung yang diunggah untuk indikator ini. Hal ini menjadi kelemahan dari Pemkot Batam yang perlu ditingkatkan pada evaluasi SPBE tahun berikutnya.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkot Batam adalah indikator terkait Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Perubahan dan Manajemen Layanan SPBE.

- Kekuatan
  Namun belum ada indikator pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang menjadi kekuatan dari Pemkot Batam karena belum ada indikator yang mencapai nilai 4-5
- Kelemahan
  Indikator pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE di Pemkot Batam memiliki tingkat kematangan 2 untuk indikator Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Perubahan dan Manajemen Layanan. Dokumentasi penerapan Manajemen Keamanan Informasi masih bersifat parsial dan belum barasaskan resiko. Interoperabilitas data masih belum berjalan sepenuhnya karena masih ada data yang harus dipertukarkan melalui pengiriman data dengan format tertentu ke Dinas Kominfo. Manajemen Perubahan yang sudah dilakukan hanya untuk 1 OPD saja dan belum pada seluruh OPD yang ada. Dokumentasi penerapan Manajemen Layanan SPBE masih bersifat parsial dan belum menangani seluruh OPD. Sedangkan untuk Penerapan Manajemen Resiko, Manajemen Sumber Daya manusia, Manajemen Aset TIK, dan Manajemen Pengetahuan SPBE masih memiliki tingkat kematangan 1. Manajemen Resiko belum dilakukan oleh Pemkot Batam. Manajemen Aset TIK beredoman pada Pengelolaan Barang Milik Daerah secara garis besar dan belum mengacu pada Pedoman Pengelolaan Aset TIK mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan hingga penghapusan. Manajemen Sumber Daya Manusia belum mencakup semua unsur yaitu perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan. Dokumentasi penerapan Manajemen Pengetahuan menggunakan

wiki.batam.go.id dinilai tidak valid karena sifat wiki yang bisa ditulis oleh siapa saja sementara seharusnya manajemen pengetahuan didokumentasikan hanya oleh penyelenggara SPBE. Hal ini menjadi kelemahan dari Pemkot Batam yang perlu ditingkatkan pada evaluasi SPBE tahun berikutnya.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan belum ada indikator pada Aspek Audit TIK SPBE dipenuhi oleh Pemkot Batam karena belum ada indikator yang mencapai tingkat kematangan 2-5

- Kekuatan

  Dengan demikian belum ada indikator pada Aspek Audit TIK SPBE yang menjadi kekuatan dari Pemkot Batam karena belum ada indikator yang mencapai nilai 4-5
- Kelemahan

  Indikator pada Aspek Audit TIK SPBE di Pemkot Batam semuanya memiliki tingkat kematangan 1 yaitu Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan SPBE karena tidak satupun dari audit tersebut yang sudah dilaksanakan. Hal ini menjadi kelemahan dari Pemkot Batam yang perlu ditingkatkan pada evaluasi SPBE tahun berikutnya.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah dipenuhi seluruhnya oleh Pemkot Batam yang mencakup indikator terkait Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan

  Indikator pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjadi kekuatan dari Pemkot Batam adalah Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.
- Kelemahan

  Pemkot Batam masih memiliki 1 indikator pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan tingkat kematangan 2 yaitu Layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk WBS yang meskipun sudah mengandung unsur pemberian informasi dan adanya proses interaksi namun belum terlihat adanya kolaborasi dengan layanan elektronik lainnya (https://wbs.inspektorat.batam.go.id). Hal ini menjadi kelemahan dari Pemkot Batam yang perlu ditingkatkan pada evaluasi SPBE tahun berikutnya.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik sudah dipenuhi oleh Pemkot Batam yang mencakup indikator terkait Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1 (Layanan BPM PTSP - ptsp.batam.go.id), Layanan Publik Sektor 2 (Disdukcapil Bisa - disdukcapilbisa.batam.go.id) dan Layanan Publik Sektor 3 (Layanan apok.batam.id)

- Kekuatan

  Indikator pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang menjadi kekuatan dari Pemkot Batam adalah Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Publik Sektor 1 Layanan BPM PTSP - ptsp.batam.go.id)
- Kelemahan

  Indikator pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik di Pemkot Batam memiliki tingkat kematangan 1 dan 2 adalah Layanan Data Terbuka dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Dokumentasi penerapan Layanan Data Terbuka dan Layanan JDIH masih bersifat interaktif (unggah dan unduh), namun belum terlihat adanya fungsi transaksi seperti validasi/verfikasi data. Hal ini menjadi kelemahan dari Pemkot Batam yang perlu ditingkatkan pada evaluasi SPBE tahun berikutnya.

Rekomendasi

Secara umum, Pemerintah Kota Batam telah menetapkan kebijakan, menerapkan dan melakukan pengelolaan SPBE serta pengembangan berbagai layanan baik untuk keperluan administrasi pemerintahan maupun layanan terhadap masyarakat dengan BAIK sebagaimana terlihat dari beberapa keunggulan dan kelemahan berikut ini.

Pemkot Batam memiliki keunggulan dalam penerapan SPBE pada tahun evaluasi 2021 khususnya dalam aspek Layanan Administrasi Pemerintahan (Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.) dan Layanan Publik (Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Publik Sektor 1 Layanan BPM PTSP - ptsp.batam.go.id). Dengan adanya berbagai aplikasi layanan ini, Pemkot Batam telah menunjukkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Namun di sisi lain, Pemkot Batam masih memiliki beberapa kelemahan terutama dalam aspek Penyelenggara SPBE (kegiatan koordinasi belum dilakukan secara terencana dan belum terlihat adanya kolaborasi karena tidak ada data dukung yang diunggah), Penerapan Manajemen SPBE (baru dilakukan pada beberapa OPD dan belum mencakup semua unsur manajemen pendukung tingkat kematangan yang lebih tinggi) dan Audit SPBE (tidak satupun dari audit tersebut yang sudah dilaksanakan).

Penerapan SPBE melalui pengambangan berbagai aplikasi layanan di lingkungan Pemkot Batam dapat diapresiasi sebagai capaian yang SANGAT BAIK dan merupakan bukti komitmen yang sungguh-sungguh dalam pewujudan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Layanan ini pasti membawa dampak yang baik bagi pengembangan kinerja internal Pemkot Batam dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Capaian ini tentu sangat dipengaruhi oleh penetapan kebijakan internal terkait tata kelola SPBE yang sudah lengkap mencakup semua aspek dengan peta rencana dan rencana anggaran serta dukungan sumber daya manusia dan implementasi infrastruktur yang baik. Beberapa aspek yang masih perlu dikembangkan adalah terkait peningkatan peran tim koordinasi SPBE dan kolaborasi antar OPD serta penerapan manajemen SPBE termasuk pelaksanaan audit TIK. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu fokus atau prioritas pengembangan SPBE di lingkungan Pemkot Batam pada tahun berikutnya.